

Sistem Manajemen Mutu Internal Perguruan Tinggi dalam Rangka Peningkatan Akreditasi Institusi

 Ade Rahmad Kurniawan¹,  Rizki Fitriani²,  Maulina Agustin³,  Sela Kholidiani⁴

¹ Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung, Indonesia

² Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung, Indonesia

³ Institut Teknologi Dan Bisnis Diniyyah Lampung, Indonesia

⁴ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 aderahmadkurniawan5@gmail.com*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam mendukung peningkatan akreditasi institusi perguruan tinggi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif pada salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus PPEPP berperan strategis dalam membangun budaya mutu secara menyeluruh, mulai dari perumusan standar mutu hingga peningkatan berkelanjutan. Implementasi PPEPP yang konsisten terbukti mampu memperkuat ketercapaian sembilan kriteria akreditasi (C1–C9) yang ditetapkan oleh BAN-PT, seperti tata kelola, sumber daya manusia, proses pendidikan, penelitian, hingga luaran tridharma. Meskipun demikian, ditemukan tantangan dalam tahap pengendalian dan peningkatan mutu yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, integrasi antara sistem manajemen mutu internal dan standar akreditasi menjadi kunci dalam mewujudkan institusi pendidikan tinggi yang unggul, akuntabel, dan berdaya saing global.

Article Information:

Received Mei 20, 2025

Revised Juni 15, 2025

Accepted Juli 12, 2025

Keywords: PPEPP, Akreditasi, Mutu Institusi.

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang terus berkembang, perguruan tinggi dituntut untuk terus meningkatkan kualitas layanan akademik dan tata kelola institusional. Kualitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan semata, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam menerapkan sistem manajemen mutu internal yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu upaya konkret dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tersebut adalah melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan

Mutu Internal (SPMI) yang berbasis pada siklus PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (Padila & Walit, 2023). PPEPP merupakan pendekatan siklikal yang dirancang untuk memastikan bahwa semua proses pendidikan tinggi berjalan sesuai standar dan mampu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan. Penetapan standar menjadi awal dari segala proses, diikuti pelaksanaan kegiatan sesuai standar, evaluasi ketercapaian, pengendalian terhadap hasil evaluasi, hingga perbaikan berkelanjutan. Penerapan PPEPP ini bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai strategi integral dalam mendorong mutu institusi secara menyeluruh (Tetap & Dak, 2011).

Pemerintah melalui Undang-Undang No12 Tahun2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 4 butir b menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berbudaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi dapat mengembangkan sendiri budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional (Evita Sari Dalimunthe & Muhammad Syahbudi, 2023). Kualitas pelayanan harus dapat mendukung kenyamanan dan kesenangan peserta didik sehingga peserta didik dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nilai yang dimiliki dari setiap Perguruan Tinggi adalah dapat diukur dari lembaga akreditasi yang legal. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa efek positif dari akreditasi sejalan dengan efek yang ditemukan diberbagai industry dan sektor penggunaan kualitas pengelolaan (Maulana, 2022). Manfaat yang dapat diambil dari Perguruan Tinggi dan Program Studi dengan adanya akreditasi adalah adanya penilaian yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional, sehingga baik Perguruan Tinggi dan Program Studi tersebut dapat bersaing didalam pasar pendidikan. Pelaksanaan akreditasi yang ada dapat diawali dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau yang biasa disebut dengan SPMI dilakukan oleh internal Perguruan Tinggi dan Program Studi. Penjaminan mutu menjadi tujuan utama dari Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Bab III yang menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagimasyarakat, bangsa, dan Negara (Sila, 2017).

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi sangat penting dalam meningkatkan mutu, sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor yang paling memacu gerakan penjaminan mutu adalah keharusan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan penjaminan mutu internal, dimana penjaminan mutu di perguruan tinggi secara keseluruhan sangat penting karena sasaran pendidikan bukan hanya untuk akademik semata, akan tetapi lulusan yang mempunyai budaya mutu (Hermelinda et al., 2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal dibuat sebagai dasar untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dengan standar nasional dan memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia. Hasil dari Sistem Penjaminan Mutu Internal inilah yang nanti akan dijadikan dasar untuk menyusun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal oleh Program Studi dan Perguruan Tinggi atau reakreditasi yang nantinya dapat membuat dasar penilaian untuk Perguruan Tinggi (Bancin, 2017). Seiring berjalannya waktu, sudah banyak Perguruan Tinggi yang berdiri mulai dari nilai

akreditasi C sampai dengan A sehingga tidak bisa dipung kiri bahwa selalu ada persaingan antara masing-masing Perguruan Tinggi dalam pasar pendidikan. *Colleges have had to compete in aquasi-education market and this has necess it a ted many changes, not least the movement to some mechanism of self assessment.* Hal tersebut dapat diartikan bahwa mekanisme pelayanan yang ada dimasing-masing Perguruan Tinggi tidak hanya berbasis kuantitas tetapi diperlukan juga aspek kualitas (Arzeta et al., 2024).

Seiring dengan hal tersebut, akreditasi institusi perguruan tinggi menjadi tolok ukur resmi dari mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan kriteria dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), terdapat sembilan kriteria (C1–C9) yang menjadi indikator dalam menilai mutu institusi. Kesembilan kriteria tersebut meliputi: (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, (2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama, (3) Mahasiswa, (4) Sumber Daya Manusia, (5) Keuangan, Sarana dan Prasarana, (6) Pendidikan, (7) Penelitian, (8) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan (9) Luaran dan Capaian Tridharma (Suti et al., 2020). Permasalahan yang kerap muncul adalah ketidakterintegrasian implementasi PPEPP dalam kegiatan operasional perguruan tinggi dengan pencapaian indikator akreditasi. Banyak institusi yang telah melaksanakan siklus PPEPP, namun tidak mendokumentasikan atau mengaitkannya secara eksplisit dengan kriteria akreditasi. Akibatnya, pelaksanaan PPEPP berjalan normatif dan tidak mampu mendorong peningkatan akreditasi secara signifikan (Setyawan et al., 2024).

Kriteria C1 hingga C9 sesungguhnya dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan penerapan PPEPP. Misalnya, Penetapan visi, misi, dan strategi (C1) akan berkorelasi langsung dengan PPEPP pada aspek perencanaan strategis institusi. Sementara pada C3 dan C4, pengelolaan mahasiswa dan sumber daya manusia dapat diukur melalui mekanisme evaluasi dan pengendalian mutu berbasis data. Dengan demikian, integrasi PPEPP dan C1-C9 akan menciptakan sistem mutu yang selaras, terukur, dan berdampak nyata terhadap akreditasi. Selain itu, penerapan manajemen mutu internal yang efektif akan meningkatkan efisiensi institusi dalam pengelolaan sumber daya, memperkuat tata kelola, dan mengoptimalkan proses pembelajaran serta riset. Institusi yang mampu menjalankan PPEPP secara konsisten akan memiliki keunggulan kompetitif dalam perolehan akreditasi unggul, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional (R. Supyan Sauri, 2022).

Namun, tantangan implementasi PPEPP masih signifikan, terutama pada aspek pengendalian dan peningkatan. Banyak perguruan tinggi masih terjebak pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, namun belum maksimal dalam memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar pengendalian mutu dan peningkatan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan stagnasi mutu yang berdampak pada capaian akreditasi institusi. Dengan adanya urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem manajemen mutu internal berbasis PPEPP dapat diimplementasikan secara strategis untuk mendorong pencapaian indikator akreditasi C1–C9. Penelitian ini juga akan mengungkap praktik-praktik baik (best practices) dalam integrasi sistem mutu dengan standar akreditasi, serta menawarkan model pengelolaan mutu yang adaptif bagi perguruan tinggi (Ihsan & Eka Mahmud, 2025). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam pengembangan kebijakan mutu institusi, khususnya dalam penguatan sistem SPMI untuk peningkatan akreditasi. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap relasi antara PPEPP dan C1-C9, perguruan tinggi

dapat lebih strategis dalam merancang program peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan demikian, topik ini sangat relevan untuk diteliti, mengingat tantangan mutu pendidikan tinggi yang semakin kompleks dan pentingnya akreditasi sebagai instrumen pengakuan terhadap kredibilitas sebuah institusi pendidikan tinggi (Yoga Budi Bhakti et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan (Sugiyono, 2013) deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi sistem manajemen mutu internal berbasis PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam upaya peningkatan akreditasi institusi perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena manajerial dan kebijakan mutu dalam konteks nyata, dengan menggali pengalaman, persepsi, serta praktik aktor-aktor kunci di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang telah menerapkan SPMI secara menyeluruh dan sedang dalam proses peningkatan status akreditasi institusi. Subjek dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yakni mereka yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses penjaminan mutu dan akreditasi. Informan kunci terdiri atas ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), wakil rektor bidang akademik, ketua program studi, tim task force akreditasi institusi, serta dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam siklus PPEPP maupun proses akreditasi berdasarkan sembilan kriteria (C1–C9).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman informan terkait penerapan PPEPP dan keterkaitannya dengan sembilan kriteria akreditasi institusi. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen seperti dokumen standar SPMI, laporan audit mutu internal (AMI), borang akreditasi, dokumen rencana strategis, laporan kinerja, serta bukti implementasi di tingkat program studi dan institusi (Kaharuddin, 2020). Sementara itu, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan mutu, pelibatan aktor, serta dinamika koordinasi dalam siklus PPEPP. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik kualitatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data disusun dalam bentuk narasi dan tematik yang menggambarkan hubungan antara implementasi PPEPP dan pencapaian indikator C1–C9. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang dan reflektif dengan mencari pola dan kecenderungan yang muncul dari data lapangan (Abdussamad & Sik, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Manajemen Mutu Internal Berbasis PPEPP

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi merupakan kerangka kerja strategis yang dirancang untuk memastikan seluruh proses akademik dan non-akademik berjalan secara sistematis, konsisten, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. SPMI mengacu pada siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan,

Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Tahap Penetapan mencakup perumusan standar mutu yang jelas dan terukur berdasarkan visi, misi, dan tujuan institusi.

Tahap Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang telah ditetapkan, biasanya melalui audit mutu internal, monitoring, atau survei kepuasan. Kemudian, tahap Pengendalian bertujuan untuk mengatasi deviasi yang ditemukan pada saat evaluasi, dengan menyusun tindakan korektif dan preventif. Implementasi PPEPP yang konsisten tidak hanya memperkuat budaya mutu di perguruan tinggi, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam pencapaian akreditasi institusi yang unggul sesuai dengan standar BAN-PT.

1. Penetapan

Penetapan standar mutu merupakan tahap awal dalam siklus manajemen mutu internal. Di perguruan tinggi yang diteliti, proses penetapan dilakukan melalui perumusan standar mutu akademik dan non-akademik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta visi, misi, dan tujuan institusi. Tim penyusun terdiri dari pimpinan LPM, perwakilan fakultas, program studi, dan tenaga kependidikan, sehingga menghasilkan standar yang aplikatif dan dapat dijalankan. Standar-standar tersebut mencakup aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, keuangan, hingga layanan kemahasiswaan. Proses penetapan ini menghasilkan dokumen formal seperti kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir pendukung.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar mutu dilakukan oleh seluruh unit kerja berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Misalnya, pelaksanaan standar pendidikan dijalankan oleh program studi dan dosen dalam bentuk kegiatan pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan penilaian pembelajaran. Untuk standar tata kelola, pelaksanaan dilakukan melalui sistem pelaporan, pengambilan keputusan, dan koordinasi antar unit. LPM berperan dalam memfasilitasi sosialisasi standar, menyusun pedoman teknis, dan memberikan pendampingan pelaksanaan. Namun demikian, tantangan yang muncul di tahap ini adalah ketimpangan pemahaman antar unit terhadap pentingnya mutu, serta keterbatasan sumber daya dalam menjalankan standar secara maksimal.

3. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang dijadwalkan secara rutin, minimal satu kali dalam setahun. AMI dilaksanakan oleh auditor internal yang telah dilatih secara khusus. Setiap unit wajib mempersiapkan dokumen evaluasi diri dan bukti pendukung. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan terhadap standar yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Selain AMI, evaluasi juga dilakukan melalui survei kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap layanan akademik dan non-akademik.

4. Pengendalian

Hasil dari AMI tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi ditindaklanjuti melalui mekanisme pengendalian mutu. LPM memfasilitasi penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang menjadi komitmen masing-masing unit dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Monitoring pelaksanaan RTL dilakukan secara berkala melalui sistem pelaporan dan kunjungan lapangan. Selain itu, pengendalian juga dilakukan pada tingkat manajerial melalui rapat evaluasi kinerja bulanan dan tahunan. Pengendalian ini memungkinkan institusi menjaga konsistensi pelaksanaan standar serta meminimalkan risiko kegagalan mutu.

5. Peningkatan

Tahap peningkatan merupakan bentuk konkret dari komitmen perguruan tinggi terhadap mutu berkelanjutan. Berdasarkan temuan evaluasi dan hasil pengendalian, dilakukan revisi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi, hingga inovasi dalam pembelajaran. Beberapa program studi melakukan perbaikan kurikulum berbasis masukan pengguna lulusan, sementara di sisi manajerial dilakukan restrukturisasi organisasi agar lebih adaptif. Peningkatan mutu juga dilakukan melalui pelatihan, *workshop*, *benchmarking*, dan partisipasi dalam forum mutu nasional.

Tabel 1.1

Implementasi Sistem Manajemen Mutu Internal (SPMI) Berbasis PPEPP di Perguruan Tinggi

No	Tahapan PPEPP	Uraian Implementasi
1	Penetapan	Perguruan tinggi menetapkan standar mutu akademik dan non-akademik berdasarkan SN-Dikti, visi, misi, dan tujuan institusi. Proses ini melibatkan LPM, fakultas, prodi, dan tenaga kependidikan. Hasilnya berupa dokumen formal seperti kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu.
2	Pelaksanaan	Standar mutu dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai fungsi. Program studi dan dosen menjalankan standar pendidikan; tata kelola dijalankan melalui sistem pelaporan dan koordinasi. LPM memberikan sosialisasi dan pendampingan, meski masih terdapat kendala pemahaman dan keterbatasan sumber daya.
3	Evaluasi	Evaluasi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) minimal sekali setahun oleh auditor internal. Unit menyiapkan dokumen evaluasi diri dan bukti pendukung. Evaluasi juga dilakukan melalui survei kepuasan dari

		mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
4	Pengendalian	LPM menyusun dan memonitor pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari temuan AMI. Pengendalian mutu juga dilakukan lewat rapat evaluasi rutin dan kunjungan lapangan, untuk menjaga konsistensi dan mencegah kegagalan mutu.
5	Peningkatan	Berdasarkan evaluasi dan pengendalian, dilakukan revisi kebijakan, pengembangan SDM, inovasi pembelajaran, dan peningkatan sistem informasi. Upaya peningkatan juga mencakup pelatihan, benchmarking, dan partisipasi dalam forum mutu nasional.

Berdasarkan Tabel 1.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada perguruan tinggi didesain melalui siklus PPEPP, yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Pada tahap Penetapan, perguruan tinggi menyusun standar mutu berdasarkan SN-Dikti serta visi dan misi institusi, melalui keterlibatan aktif LPM, fakultas, prodi, dan tenaga kependidikan. Hasil dari proses ini berupa dokumen-dokumen formal seperti kebijakan mutu dan manual mutu. Selanjutnya, pada tahap Pelaksanaan, seluruh unit menjalankan standar mutu sesuai tupoksinya. Misalnya, standar pendidikan dijalankan melalui pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan penilaian oleh dosen di prodi, sedangkan standar tata kelola dilaksanakan melalui pelaporan dan koordinasi lintas unit. Namun pelaksanaan ini seringkali menghadapi tantangan seperti ketimpangan pemahaman mutu antar unit dan keterbatasan SDM.

B. Ketercapaian Standar Akreditasi Institusi (C1–C9)

Dalam penilaian akreditasi, perguruan tinggi diwajibkan menunjukkan bukti nyata atas capaian mutu yang terukur berdasarkan sembilan kriteria utama yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kesembilan kriteria ini meliputi: (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; (2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama; (3) Mahasiswa; (4) Sumber Daya Manusia; (5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana; (6) Pendidikan; (7) Penelitian; (8) Pengabdian kepada Masyarakat; dan (9) Luaran dan Capaian Tridharma. Masing-masing kriteria memiliki fokus penilaian yang berbeda namun saling terkait satu sama lain dalam membentuk kualitas institusi secara holistik.

Implementasi sistem PPEPP dalam SPMI berperan penting dalam memastikan ketercapaian seluruh kriteria tersebut secara sistematis dan berkelanjutan. Misalnya, kriteria visi dan strategi (C1) hanya dapat dicapai secara efektif jika standar mutu ditetapkan secara terukur (Penetapan), dijalankan dengan konsisten (Pelaksanaan), dan terus dievaluasi serta ditingkatkan. Demikian pula, ketercapaian indikator-indikator seperti jumlah penelitian, publikasi, keterlibatan mahasiswa dalam program pengabdian, serta capaian kerja sama luar negeri akan bergantung pada bagaimana perguruan tinggi menerapkan PPEPP untuk menjamin mutu proses dan hasilnya.

Dengan kata lain, SPMI bukan hanya alat administrasi, tetapi menjadi mesin penggerak utama dalam pencapaian akreditasi unggul. Ketika siklus PPEPP berjalan secara efektif, perguruan tinggi memiliki bukti dan dokumentasi yang solid untuk setiap kriteria akreditasi. Oleh karena itu, integrasi antara sistem mutu internal dan standar akreditasi menjadi kunci keberhasilan institusi dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan daya saing di tingkat nasional maupun global.

1. C1 – Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Visi dan misi institusi telah dirumuskan secara realistis, aspiratif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Proses peninjauan dilakukan secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, seperti alumni, mitra industri, dan pemerintah daerah. Tujuan strategis dirumuskan ke dalam Renstra dan Rencana Operasional yang dievaluasi setiap tahun. Dokumen perencanaan tersebut menjadi dasar pengukuran keberhasilan institusi dalam proses akreditasi.

2. C2 – Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama

Perguruan tinggi telah menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan. Struktur organisasi berjalan efektif, dengan adanya pembagian tugas yang jelas. Kerja sama institusional juga berkembang pesat, terbukti dengan jumlah MoU dan implementasi kerja sama yang relevan dengan tridharma perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

3. C3 – Mahasiswa

Pengelolaan mahasiswa dilakukan secara terencana sejak rekrutmen hingga kelulusan. Sistem seleksi masuk sudah berbasis merit, sedangkan pembinaan mahasiswa dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, layanan konseling, dan program pengembangan soft skills. Lulusan menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan sosial dan keterampilan kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

4. C4 – Sumber Daya Manusia

Komposisi dosen tetap dengan kualifikasi magister dan doktor telah memenuhi rasio yang disyaratkan. Upaya pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan, studi lanjut, serta dukungan untuk meneliti dan menulis publikasi. Perguruan tinggi juga memiliki sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan berbasis indikator yang terukur.

5. C5 – Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Sumber pendanaan institusi cukup beragam, baik dari SPP, kerja sama, hibah, maupun unit usaha. Anggaran dikelola secara efisien dan transparan melalui sistem informasi keuangan. Sarana dan prasarana pembelajaran, seperti ruang kuliah, laboratorium, dan perpustakaan, mendukung pencapaian pembelajaran. Selain itu, infrastruktur digital seperti e-learning dan sistem informasi akademik juga berjalan optimal.

6. C6 – Pendidikan

Kurikulum telah disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). Proses pembelajaran berlangsung aktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan instrumen yang tervalidasi dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas perkuliahan.

7. C7 – Penelitian

Kegiatan penelitian dosen mengalami peningkatan baik dalam jumlah proposal, dana hibah, maupun luaran publikasi. Penelitian diarahkan sesuai roadmap institusi dan bidang keilmuan masing-masing dosen. Luaran dalam bentuk jurnal nasional dan internasional, HKI, serta produk inovatif telah mendukung akreditasi institusi.

8. C8 – Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan berbasis hasil riset dan kebutuhan lokal. Program yang dijalankan mencakup pelatihan, pemberdayaan ekonomi, hingga edukasi kesehatan masyarakat. Kolaborasi dengan mitra desa dan pemerintah setempat memperkuat dampak dan keberlanjutan kegiatan PKM.

9. C9 – Luaran dan Capaian Tridharma

Capaian tridharma menunjukkan hasil yang menggembirakan, baik dari aspek publikasi ilmiah, serapan lulusan, kerja sama institusional, maupun penghargaan akademik. Data tracer study digunakan sebagai dasar kebijakan perbaikan kurikulum dan strategi pembelajaran. Capaian ini menjadi indikator kuat dalam proses penilaian akreditasi.

Tabel 1.2

Kriteria Akreditasi dan Implementasi SPMI

Kode	Kriteria Akreditasi	Fokus Penilaian dan Implementasi SPMI (PPEPP)
C1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Perumusan dan evaluasi visi-misi yang realistis dan partisipatif; dituangkan dalam Renstra & Renop; dijalankan melalui PPEPP secara sistematis.
C2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	Praktik good governance, struktur organisasi efektif, kerja sama tridharma dengan mitra nasional dan internasional.
C3	Mahasiswa	Rekrutmen berbasis merit; pembinaan melalui kegiatan organisasi, konseling, dan soft skills; lulusan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja.
C4	Sumber Daya Manusia	Kualifikasi dosen sesuai rasio; pengembangan SDM lewat pelatihan,

		studi lanjut, dan publikasi; evaluasi kinerja dosen berbasis indikator mutu.
C5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	Pendanaan beragam; pengelolaan anggaran transparan; fasilitas belajar memadai termasuk digitalisasi sistem akademik dan pembelajaran.
C6	Pendidikan	Kurikulum berbasis KKNI & MBKM; pembelajaran aktif dan berbasis TIK; evaluasi berkelanjutan untuk peningkatan kualitas.
C7	Penelitian	Peningkatan jumlah dan kualitas riset dosen; roadmap institusi jelas; output berupa jurnal, HKI, dan inovasi.
C8	Pengabdian kepada Masyarakat	Kegiatan PkM berbasis riset dan kebutuhan lokal; berkelanjutan melalui kerja sama dengan mitra desa dan pemda.
C9	Luaran dan Capaian Tridharma	Publikasi, serapan lulusan, penghargaan akademik, kerja sama, dan tracer study sebagai bukti keberhasilan tridharma dan dasar evaluasi mutu.

Tabel 1.2 merangkum sembilan kriteria utama penilaian akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), mencakup aspek visi, tata kelola, mahasiswa, sumber daya manusia, pendanaan dan sarana, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta luaran tridharma. Setiap kriteria memiliki fokus penilaian tersendiri namun saling berkaitan dalam membentuk kualitas institusi secara holistik. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) menjadi mekanisme utama untuk memastikan ketercapaian standar mutu secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Misalnya, keberhasilan dalam aspek visi dan misi hanya dapat dicapai jika standar ditetapkan secara realistis, diterapkan secara konsisten, serta dievaluasi dan ditingkatkan secara terus-menerus. Demikian pula, indikator capaian seperti publikasi ilmiah, keterlibatan mahasiswa, kerja sama internasional, dan tracer study lulusan semuanya bergantung pada efektivitas sistem mutu internal. Dengan demikian, keterpaduan antara SPMI dan sembilan kriteria akreditasi menjadi kunci penting dalam mewujudkan institusi yang unggul, akuntabel, transparan, dan memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun global.

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) terbukti memainkan peran penting dalam peningkatan mutu perguruan tinggi. Melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, SPMI mampu membangun budaya mutu yang konsisten di seluruh unit kerja institusi. Siklus PPEPP tidak hanya memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga meningkatkan efektivitas manajemen institusi dalam menghadapi tuntutan globalisasi dan persaingan di sektor pendidikan tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketercapaian sembilan kriteria

akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT (C1–C9) sangat bergantung pada seberapa kuat integrasi PPEPP dalam kegiatan operasional institusi. Setiap kriteria, mulai dari visi-misi hingga luaran tridharma, dapat dicapai secara optimal bila institusi mampu menjalankan PPEPP secara konsisten, terdokumentasi, dan berbasis data. Artinya, SPMI bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam pencapaian akreditasi unggul dan daya saing institusi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi PPEPP, terutama pada aspek pengendalian dan peningkatan mutu. Banyak perguruan tinggi terjebak pada pelaksanaan yang bersifat normatif dan belum memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk memperkuat pemahaman seluruh sivitas akademika terhadap pentingnya SPMI, meningkatkan kapasitas SDM, serta membangun sistem informasi mutu yang efektif. Melalui upaya tersebut, institusi pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan mampu menyusun kebijakan mutu yang lebih adaptif dan strategis demi mencapai akreditasi institusi yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTKA

Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Arzeta, D. D., Saragih, W., & Putri, I. P. (2024). Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti) Melalui Strategi Manajemen Komunikasi Organisasi Lembaga Pendidikan Sebagai Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Soshum Insentif*, 7(2), 63–73.

Bancin, A. (2017). Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 1.

Evita Sari Dalimunthe, K., & Muhammad Syahbudi. (2023). Pentingnya Penjaminan Mutu Terpadu dalam Mewujudkan Identitas Pendidikan Unggul Melalui Akreditasi. *Jurnal Research and Education Studies*, 3(1), 11–20. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>

Hermelinda, T., Meriana, & Afriansyah, B. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Budaya Mutu Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi di Propinsi Bengkulu). *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(2), 183–195. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz/article/view/1620%0Ahttps://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz/article/download/1620/842>

Ihsan, M., & Eka Mahmud, M. (2025). Urgensi Akreditasi Perguruan Tinggi di Indonesia. *NABAWI (Jurnal Penelitian Pendidikan Islam)*, 3(2), 213–229. <http://repository.iainkudus.ac.id/9232/>.

Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>

Maulana, M. I. (2022). Peran Sistem Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas di Lembaga Pendidikan. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v2i1.15867>

Padila, A., & Walit, A. (2023). Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Akreditasi Program Studi. *Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 88–104.

R. Supyan Sauri. (2022). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Di Universitas Islam Nusantara Bandung. *Media Nusantara*, 16(1), 27–40.

Setyawan, H., Samsiyah, S., Maryatun, I., & Riasmisati, A. (2024). Akreditasi Kearsipan Di Perguruan Tinggi Indonesia: Prosedur, Pengaruh, Dan Tantangan Dalam Peningkatan Kualitas Manajemen Arsip. *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan*, 4(2), 43–59. <https://doi.org/10.24821/jap.v4i2.13561>

Sila, I. M. (2017). The Role of Higher Education Management Based Spmi in Improving Service To Create a Quality Education. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 2085, 1–10.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Suti, M., Syahdi, M. Z., & D., D. (2020). Tata Kelola Perguruan Tinggi dalam Era Teknologi Informasi dan Digitalisasi. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 3(2), 203. <https://doi.org/10.35914/jemma.v3i2.635>

Tetap, D., & Dak, F. (2011). *PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI Halimatus Sakdiah*. 16(1), 25–38.

Yoga Budi Bhakti, Achmad Ridwan, & Riyadi. (2022). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal & Eksternal Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 251–260. <https://doi.org/10.25078/jpm.v8i02.1394>